

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kalurahan Sukoreno, Kabupaten Kulon Progo, merencanakan dan menggunakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Dana Keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana ini diberikan untuk mendukung program-program yang sesuai dengan kekhususan Yogyakarta, terutama yang berkaitan dengan budaya dan potensi lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumen yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perencanaan program dilakukan melalui musyawarah warga dari tingkat dusun sampai kalurahan, lalu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah provinsi. (2) penganggaran dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan, dari penyusunan rencana hingga pencairan dana. (3) Pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan lancar karena beberapa usulan tidak disetujui atau tidak bisa dijalankan akibat keterbatasan dana. (4) Beberapa kendala yang dihadapi antara lain pemahaman aturan yang masih rendah, kualitas proposal yang belum maksimal, serta perubahan kebijakan yang cukup cepat. Penelitian ini merekomendasikan agar kapasitas aparat desa ditingkatkan dan masyarakat lebih dilibatkan agar penggunaan dana bisa lebih tepat sasaran dan bermanfaat.

**Kata Kunci:** Dana Keistimewaan, Kalurahan Sukoreno, Perencanaan, Penganggaran, Bantuan Keuangan Khusus, Pemerintah Desa.

## ABSTRACT

This study aims to find out how Kalurahan Sukoreno, located in Kulon Progo Regency, plans and utilizes the Special Financial Assistance (BKK) from the Special Autonomy Fund (Dana Keistimewaan) provided by the Government of the Special Region of Yogyakarta. This fund is intended to support programs that reflect Yogyakarta's special status, especially those related to culture and local potential. The study uses a descriptive qualitative method by collecting data through interviews and existing documents. The results show that: (1) Program planning is carried out through community meetings from the hamlet (dusun) to the village (kalurahan) level, and then aligned with the provincial government's strategic policies. (2) Budgeting is done by following established procedures, from preparing plans to fund disbursement. (3) Program implementation has not run smoothly in all cases, as some proposals were not approved or could not be carried out due to limited funding. (4) Several challenges include limited understanding of regulations, low-quality proposals, and frequent changes in policy. This study recommends improving the capacity of village officials and increasing community involvement so that fund usage can be more targeted and beneficial.

**Keywords:** Special Autonomy Fund, Kalurahan Sukoreno, Planning, Budgeting, Special Financial Assistance, Village Government.